



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2020/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI
SUB UNIT KERJA : KEPALA LEMBAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUHARSONO**
2. Jabatan : **BUPATI**
3. NHK : **208349**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 3.986.000.000**

1. Tanah Seluas 400 m² di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 405.000.000
2. Tanah Seluas 336 m² di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 341.000.000
3. Tanah Seluas 656 m² di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 305.000.000
4. Tanah Seluas 348 m² di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
5. Tanah Seluas 399 m² di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
6. Tanah Seluas 402 m² di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
7. Tanah Seluas 565 m² di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000
8. Tanah Seluas 397 m² di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 395.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 673 m²/300 m² di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 975.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 530.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOBIL, CHRYSLER CHEROKEE Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp.



117.000.000

3. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

19.000.000

4. MOTOR, KAWASAKI BR125H Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

10.000.000

5. MOBIL, TOYOTA ALPHARD MPV Tahun 2007, HASIL SENDIRI

Rp. 159.000.000

6. MOTOR, YAMAHA XMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

45.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 3.324.176.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 452.461.349

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 8.292.637.349

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 8.292.637.349

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **15 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.